

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Absori. (2014). *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan*. Muhammdiyah University Press.
- Ali, Z. (2019). *Buku Praktis Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Alting Husein. (2010). *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksa Bang Presindo.
- Arba, H. M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bernard, L. (2011). *Politik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Chomzah, A. H. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Prestasi Pustakaraya.
- Chomzah, A. H. (2007). *Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustakaraya.
- Effendie, B. (1993a). *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Alumni.
- Effendie, B. (1993b). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. Alumni.

- Ginting, D. (2010). *Hukum Kepemilikan Atas Tanah*. Ghalia Indonesia.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR: Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Harahap, Y. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanannya*. Djambatan.
- Hiariej, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi)*. Cahaya Atmapustaka.
- Kansil, C. S. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum dan Politik Agraria*. Karunia Universitas Terbuka.
- Merukusumo, S. (1998). *Hukum dan Politik Agraria*. Karunia Universitas Terbuka.
- Mu'adi, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*. Prestasi Pustakaraya.
- Muhamad Yamin & Rahim Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Mandar Maju.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perikatan*. Alumni.

- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni.
- Nawawi, B. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Nugroho, S. A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Nurmaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Parlindungan, A. (2008). *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Mandar Maju.
- Perangin, E. (1989). *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali Pers.
- Perangin, E. (1995). *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti.
- Ruchiyat, E. (2006). *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Baru*. Alumni.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2019). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Prenadamedia Group.
- Santoso, U. (2013). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana.

- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana Prenada Media Group.
- Sarjita. (2005). *Tekni dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugu Jogja Pustaka.
- Siahaan, M. P. (n.d.). *BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan: Teori & Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, M. (2018). *Perjuangan Negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak*. Mitra Wacana Media.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum (16th ed.)*. Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalian Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2nd ed.)*. Alfabeta.
- Sumarja, F. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah (versi lengkap)*.
- Suryatin. (2001). *Hukum Ikatan*. Pradnya Paramita.
- Syahrani, R. (2009). *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. PT. Alumni.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Utomo, B. (2013). *Hukum Perdata*. Penerbit Sejahtera.

Vollmar, H. F. A. (2004). *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*. Rajawali Pers.

Waskito. (2015). *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*. PT. Media Adji.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

### **Sumber Lainnya**

Andri, B. (2024). Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1473 K/Pdt/2019). *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.606>

Argent, P. d'. (2021). *International Law Textbook for Chapter 7: Seeking Justice*. Louvain X MOOC.

- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>
- Ayuningtyas, T. R., Laila, N., Septiana, I., Sallwa, A., & Rizki, B. (2024). Analisa Hukum Terhadap Pengaturan Hak Guna Usaha di Ibu Kota Negara. *Unes Law Review*, 6(4), 11766–11776.
- Dewandaru, P. A. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Notarius*, 13(1), 155.
- Dirmansah, A., Amalia, A., Husaeni, H., Kontesa, E., & Deananda, A. (2025). Analisis Yuridis Sengketa Akses Jalan Warga Cluster Green Village Bekasi Utara Akibat Penyerobotan Tanah Oleh Pengembang. *Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum*, 4(2), 1–18.
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. eka, Prayitno, S., & Purwanto, A. (2017). PROSEDUR PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 5(10), 90–101.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1), 138–142.
- Indraswari, S. A. (n.d.). Kronologi Versi Pengembang Cluster di Tambun Mau Digusur Meski Punya SHM. *Detik Properti*. <https://www.detik.com/properti/berita/d-7764797/kronologi-versi-pengembang-cluster-di-tambun-mau-digusur-meski-punya-shm>

- Jayadi, H., Situmeang, T., Siringoringo, P., Widyani, I. D. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia. *JURNAL ComunitÃ Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 1050–1069. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4287>
- Kalsum, N. U., & Mappaselleng, N. F. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- Kartiwi, M. (2020). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah. *Res Nullius Law Journal*, 2(1), 35–48.
- Kaunang, M. C. (2016). Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, 5(4), 68–75.
- Kiki Rizki, Rini Irianti Sundary, Jafar Sidik, Lina Jamilah, & Yeni Yunitawati. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. 2507(February), 1–9.
- Layyin Mahfiana. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1), 87.
- Maria, S.W ., & Sumardjono. (2007). Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Moertiono, R. J. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(1), 1–21.
- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum*, 14(3), 1–10.
- Nida, S. F. (2021). Penyelesaian Kepemilikan Tanah yang Bersertifikat Ganda pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Depok Jawa Barat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nirwana, Patitinggi, F., & Nur, S. S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah Sesungguhnya Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Rincik Palsu. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 182.
- Pahlevi, R. R., Zaini, Z. D., & Hapsari, R. A. (2021). Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 18–28.  
<https://doi.org/10.31869/plj.v5i1.2826>
- Panget, A. E. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertifikat Hak Milik Ganda. *Lex Administratum*, 1(3), 1–4.
- Rabiah, D. (n.d.). Kronologi Sengketa Lahan Cluster Setia Mekar Residence 2. *Metro TV*. <https://www.metrotvnews.com/play/KZmCVP9G-kronologi-sengketa-lahan-klaster-setia-mekar-residence-2>
- Salfutra, R. D. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 2148.

- Salim, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda. *Sistem Informasi Jurnal Ilmiah USM*, 2(2), 174–187.
- Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 54.
- Sukoharjo, J. (2023). Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya. *JDIH Sukoharjo*. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>
- Susanti, Z. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. *Wasaka Hukum*, 11(2), 35–45.
- Widiyanto, L. O. (2018). Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Sebagai Hak Milik. Universitas Jember.
- Wijayanti, T. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216.
- Winanti, A., Qurrahman, T., & Agustanti, R. D. (2021). Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 3(2), 431–438. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i2.9464>

Zefanya Uway, V. I. (2017). Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah yang Diduduki Secara Melawan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, 5(1), 132.